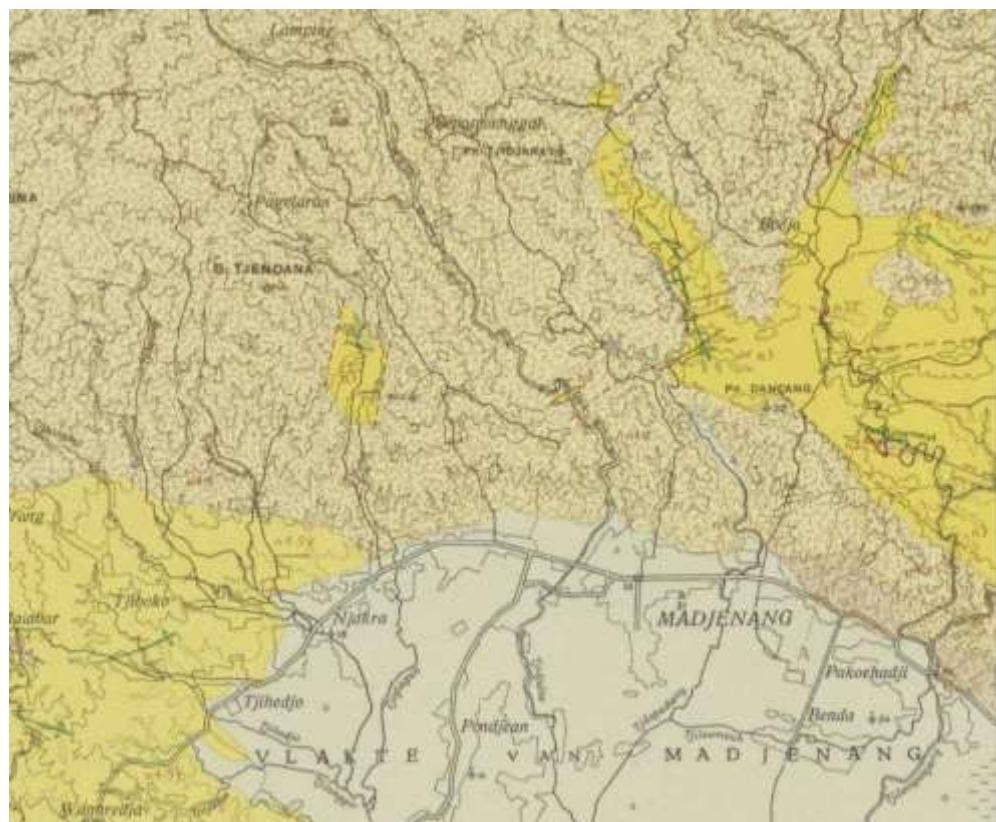


BAB II

PROFIL MAJENANG PADA TAHUN 1915-1935

2.1 Letak Geografis Majenang

Gambar 2. 1 Peta Kecamatan Majenang pada tahun 1935



Sumber: W.H. Hetzel³⁰

Secara geografis Kecamatan Majenang merupakan bagian dari Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Majenang terletak di sebelah Barat Kabupaten Cilacap dengan jarak ke ibu kota Kabupaten sejauh 86 KM. Majenang memiliki luas wilayah 167,60 KM dengan jumlah penduduk 146.630 jiwa.

³⁰ W.H. Hetzel, *Geologische Kaart van Java* (Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië, 1935).

Sebagian besar wilayah Majenang adalah pegunungan dan sebagiannya adalah daratan dengan ketinggian sekitar 100 meter sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Sehingga, Majenang juga cukup banyak ditanami perkebunan kopi dan termasuk kecamatan penghasil kopi terbesar di Kabupaten Cilacap. Selain itu, Majenang banyak mendapat areal perkebunan peninggalan kolonial seperti Perkebunan Kawung milik PTPN XI yang mengelola komoditas karet, teh, dan kopi. Areal hutan yang luas ini menjadikan Majenang sebagai kawasan hutan lindung karena menjadi habitat bagi banyak flora dan fauna. Di hutan wilayah Ujungbarang dan Sadahayu masih dapat ditemui hewan-hewan liar seperti rusa (*menjangan/uncal/kidang*), kancil (*peucang*), banteng, dan macan kumbang.



Selain hasil perkebunan, Majenang juga terkenal sebagai daerah penghasil beras terbesar, karena memiliki areal persawahan yang cukup luas, sehingga banyak masyarakatnya yang bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian di Majenang turut ditunjang dengan curah hujan yang tinggi serta terdapat 3 aliran sungai yang cukup melimpah yaitu Sungai Cijalu, Sungai Cilopadang, dan Sungai Cileumeuh.

Menurut data BPS, luas lahan pertanian padi sawah di Majenang pada tahun 2023 adalah 14.644 Ha. Sedangkan lahan pertanian bukan sawah seperti tegal/kebun seluas 2.815 Ha, hutan milik negara seluas 4.233 Ha, dan lainnya (hutan rakyat, tambak/kolam) 71 Ha. Wilayah hutan negara ini paling banyak berada di Kecamatan Ujungbarang yaitu 1.055 Ha dan Sadahayu 1.032 Ha. Lalu, untuk kawasan tanah sawah paling luas yaitu Pahonjean seluas 530.40 Ha dan Mulyasari 347.90 Ha.³¹

Secara ekonomi, Kecamatan Majenang merupakan jantung perekonomian di wilayah Cilacap bagian Barat. Hal ini karena dilintasi oleh jalan utama lintas provinsi antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jalan tersebut menjadi arus utama transportasi di selatan Jawa, sehingga membuat Kecamatan Majenang terkena dampak yang besar yaitu hidupnya perekonomian masyarakat setempat. Maka, dengan keunggulan letak geografisnya ini menjadikan Majenang sebagai kecamatan yang vital bagi Cilacap, sehingga akan menarik untuk dikaji secara historis kondisi sosial dan perekonomiannya.

Secara administratif, Kecamatan Majenang terdiri dari 17 Desa antara lain Pahonjean, Mulyadadi, Mulyasari, Padangsari, Cilopadang, Padangjaya, Sindangsari, Jenang, Salebu, Cibeunying, Sepatnunggal, Bener, Boja, Ujungbarang, Sadabumi, dan Sadahayu. Berikut ini tabel luas wilayah Majenang berdasarkan luas desanya menurut data BPS pada tahun 2024.

³¹ BPS, *Kecamatan Majenang Dalam Angka 2024* (BPS Kabupaten Cilacap, 2024).

Tabel 2. 1 Luas Daerah Menurut Desa di Kecamatan Majenang, 2024

| Desa | Luas Total Area (km ² /sq.km) | Percentase terhadap luas Kecamatan (%) |
|---------------------------|---|---|
| Pahonjean | 11,511 | 6,87 |
| Mulyadadi | 5,900 | 3,52 |
| Mulyasari | 4,244 | 2,53 |
| Padangsari | 9,142 | 5,45 |
| Cilopadang | 6,613 | 3,95 |
| Padangjaya | 6,101 | 3,64 |
| Sindangsari | 1,997 | 1,19 |
| Jenang | 3,470 | 2,07 |
| Salebu | 22,882 | 13,65 |
| Cibeunying | 8,021 | 4,79 |
| Sepatnunggal | 6,198 | 3,70 |
| Bener | 11,239 | 6,71 |
| Boja | 13,383 | 7,99 |
| Ujungbarang | 13,476 | 8,04 |
| Pangadegan | 7,585 | 4,53 |
| Sadabumi | 16,959 | 10,12 |
| Sadahayu | 18,873 | 11,26 |
| Kecamatan Majenang | 167,60 | 100,00 |

Sumber: Data BPS, 2024³²

Berdasarkan data Tabel 2.1, Kecamatan Majenang pada tahun 2024 terdiri atas 17 desa dengan total luas wilayah sebesar 167,60 km². Dari keseluruhan desa, terdapat ketimpangan yang cukup mencolok dalam distribusi luas wilayah antar desa. Desa terluas adalah Salebu dengan luas 22,882 km² atau sekitar 13,65% dari total luas kecamatan, disusul oleh Sadahayu 18,873 km² (11,26%) dan Sadabumi 16,959 km² (10,12%). Sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Sindangsari 1,997 km² (1,19%), Jenang 3,470 km² (2,07%), dan Mulyasari 4,244 km² (2.53%).

³² BPS, *Kecamatan Majenang Dalam Angka 2024*. Hlm. 7

2.2 Perkembangan Wilayah Majenang

2.3.1. Majenang pada Masa VOC dan Kolonial Belanda

Pada bahasan ini peneliti akan membahas tentang bagaimana posisi dan eksistensi Majenang pada masa VOC hingga dilanjutkan pada masa kolonial Hindia Belanda. Hal ini dimaksudkan agar dapat memahami perkembangan kewilayahan Majenang ini, mulai dari masuk sebagai salah satu distrik di Dayeuhluhur hingga menjadi kecamatan di Kabupaten atau *Regen* Cilacap.

Di pembahasan sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana Kadipaten Dayeuhluhur yang berada di wilayah kekuasaan Surakarta (Sebelumnya Mataram) turut diserahkan kepada VOC atas perjanjian penyerahan Kerajaan. Sebelum itu, sebenarnya telah terjadi Perang Mangkubumi yang diakhiri dengan Perjanjian Guyanti yaitu penyerahan separuh Mataram kepada Pangeran Mangkubumi yang disebut Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada 1755.

Sedangkan Kasunanan Surakarta mendapatkan wilayah Sebagian besar Mancanagara Kulon, maka Kadipaten Dayeuhluhur menjadi wilayah kekuasaan Surakarta secara *de facto* bersama dengan Banjar, Banyumas dan Pasir (Purwakerta), Ngayah, Kalibeber, Roma (Karanganyar), Karangbolong, Warah, Tersana, Karenjang, Lebaksiyu, Balapulang, Bobotsari, Kartanegara, dan Bentar.

Pada tahun 1755, kekuasaan Wirapraja digantikan oleh putranya yang bernama Wiradika I. Kekuasaan Wiradika I kemudian digantikan lagi

oleh keponakannya yang bergelar Wiradika II pada tahun 1788 dengan alasan Wiradika I ini telah makar kepada Surakarta dan VOC. Namun, karena Wiradika II ini kurang cakap maka disekolahkan terlebih dahulu di Keraton Surakarta, untuk sementara waktu jabatannya diisi oleh Wiraguna.³³

Pada masa kepemimpinan Wiraguna yaitu 1799-1812 inilah Ibukota Kabupaten Dayeuhluhur kembali dipindahkan ke Majenang sebagai ibukota awal Dayeuhluhur semasa didirikan oleh Gagakngampar dahulu. Nama Dayeuhluhur pun diganti menjadi Kabupaten Majenang, sedangkan wilayah Ibukota Dayeuhluhur berubah menjadi desa statusnya biasa.

Atas pemindahan ibukota dan nama Kabupaten ini kemudian memunculkan dualisme kepemimpinan Dayeuhluhur di Majenang. Hal ini karena diawali dengan selesainya masa Pendidikan Wiradika II, yaitu Wiradika II kembali menjadi Bupati Dayeuhluhur dan Wiraguna masih menjadi Bupati Majenang yang kedudukannya sama-sama beribukota di Majenang. Namun setelah itu, baru dilebur kembali pada 1824 menjadi Kabupaten Dayeuhluhur dengan ibukota tetap di Majenang dan mengangkat Wiradika III sebagai Bupati Dayeuhluhur.³⁴

Pada 22 Juni 1830, terjadi penyerahan kekuasaan Kasunanan Surakarta terhadap Pemerintah Hindia Belanda yaitu menyerahkan kekuasaan *Mancanagara Kulon* kepada pihak Belanda. Oleh pemerintah

³³ *Ibid.* Hlm. 29

³⁴ *Ibid.*

Belanda, Kabupaten Dayeuhluhur mengalami pemekaran atau perluasan ke arah barat yaitu hingga Sungai Cijolang, hal ini bertujuan agar memudahkan pemasaran komoditas ekspor hasil pertanian dan pertanian akibat *Cultuur Stelsel*, karena awalnya jarak tempuh menuju Pelabuhan Cirebon itu sangat jauh kurang lebih 121 km. Pemekaran diprakarsai oleh Asisten Residen Vitalis di Dayeuhluhur, hal ini karena Dayeuhluhur berada di bawah Residen Banyumas dengan pembagian wilayah paling barat Karesidenan Banyumas menjadi 2 *afdeling* yaitu Ajibarang dan Dayeuhluhur.³⁵

Maka, tidak mengherankan apabila pada masa sekarang budaya termasuk di dalamnya bahasa dan budaya yang berkembang di Cilacap bagian barat yaitu Dayeuhluhur dan Majenang merupakan bentuk perpaduan Sunda dan Jawa, karena adanya perluasan wilayah hingga Sungai Cijolang tersebut.

Secara batas wilayah, lebih lengkapnya bisa diperoleh berdasarkan surat keputusan Gubernur Jendral Mr. J. G. van den Bosch tanggal 18 Desember 1830 No. 1, maka Mr. P.H. van Lawick van Pabst, Komisaris Tanah Tanah Kerajaan pada tanggal 20 April 1830 menyusun batas batas Kabupaten Dayeuhluhur sebagai berikut:³⁶

³⁵ *Ibid.* Hlm. 30

³⁶ C. Lekkerkerker, *Land En Volk van Java* (Wolters, 1938).

- a. Batas selatan: dari muara Sungai Serayu mengikuti batas selatan Karesidenan Banyumas, menelusuri pantai ke arah barat daya melalui desa Cilacap hingga muara Sungai Citanduy.
- b. Batas barat: mengikuti sebagian batas Barat Karesidenan Banyumas, dari muara Sungai Citanduy ke hulu sampai muara Sungai Cijolang di selatan, ke hulu sampai kaki barat Gunung Bongkok.
- c. Batas utara: dari kaki barat Gunung Bongkok melalui puncaknya ke arah Gunung Suban, ke arah timur menuju Gunung Telaga di Pegunungan Kendeng Utara.
- d. Batas timur: dari Gunung Telaga Boga ke arah selatan melalui Gunung gunung Caun, Windu Negara, Puseran, Kotajaya dan Gunung Badok menuju ke kaki gunung terakhir pada tepi Sungai Serayu dan ke arah hilir sampai muara Sungai Serayu.

Maka dapat disimpulkan bahwa pada waktu itu Kabupaten Dayehluhur merupakan daerah cikal bakal Kabupaten Cilacap sebelah barat Sungai Serayu, sedangkan daerah cikal bakal sebelah timur Sungai Serayu (eks Kawedanan Kroya) masih termasuk Kabupaten Banyumas.³⁷ Berikut ini peta Kabupaten Dayehluhur sebagai cikal bakal dari Kabupaten Cilacap pada tahun 1830 yang diambil dari *Inventaris van*

³⁷ Amuttetz, *Kort Verslag Der Rivier Serajoe in de Residentie Banjoemaas En Het Terrein Telatjap 1831* (ANRI, 1831).

kaarten en tekeningen behorende tot het archief van het Ministerie van Koloniën en rechtsopvolgers.

Gambar 3.1. Peta wilayah Kabupaten Dayehluhur Tahun 1830



Sumber: MIKO³⁸

Kabupaten Dayehluhur terdiri dari 4 distrik yaitu distrik Dayehluhur, distrik Majenang, distrik Jeruklegi, dan distrik Pegadingan. Adapun wilayah distrik Majenang mempunyai batas wilayah yaitu sebelah Barat batas Timur Distrik Dayehluhur menuju Sungai Cigegumi bermuara di Sungai Cikawung, ke arah timur dan tenggara menuju Sungai Cikondang bermuara ke hulu menuju mata air di Kendeng sebelah utara.

³⁸ Inventaris van kaarten en tekeningen behorende tot het archief van het Ministerie van Koloniën en rechtsopvolgers, *Kaart van Java En Madura Voorzien van Een Staat van Het Aantal Inwoners En Oppervlakte Aanduiding.* 'Met Inzetten van Batavia, de Wijnkoopse Baai, de Rede Tjipattat, de Rede Tjilatjap En de Baai Pattjetan.

(1830)

<https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/4.MIKO/invnr/73/file/NL-HaNA_4.MIKO_73>.

Dari titik mata rantai pegunungan tersebut ke arah barat melalui puncak puncak utara Gunung-gunung Maruyung, Selokambang dan Geni, terus menuju puncak Gunung Sengan.³⁹

Kemudian setahun berselang yaitu pada 24 Oktober 1831, melalui surat Asisten Residen Ajibarang dengan besluit Nomor 184 tahun 1831, Kabupaten Dayehluhur ditiadakan dan hanya berstatus sebagai Kepatihan atau *Pattehschap* Dayehluhur di bawah Kabupaten Ajibarang. Hal tersebut dilakukan karena Bupati Dayehluhur bernama Tumenggung Prawiranegara terlibat dalam perang Jawa mendukung Pangeran Diponegoro.

Pada 27 Juni 1841 melalui Surat Keputusan Wakil Gubernur Jendepietral Mr. Pieter Merkus Nomor 10231 ditetapkan: “Kepatihan (Pattehschap) Dayu-Luhur dipisahkan dari Kabupaten Purwokerto dan Distrik Adireja dipisahkan dari Kabupaten Banyumas, dan dijadikan satu Afdeling tersendiri yaitu Afdeling Cilacap dengan ibu kota Cilacap (sekarang) yang menjadi tempat kedudukan Kepala Pejabat Eropa, Asisten Residen dan Kepala Pejabat Pribumi Rangga atau Onder Regent dengan gaji f 150 per bulan, bukan Regent lazimnya. Dengan demikian Pemerintahan Pribumi dinamakan Onder Regentschap (dibawah Kabupaten).”

Onder Regentschap Cilacap sebetulnya merupakan kesinambungan perubahan struktur kekuasaan pemerintahan daerah Negeri Dayehluhur

³⁹ Amuttetz, *Op. Cit.*

yang pada saat terakhir bernama *Pattehschap* Dayeuhluhur, mengalami pemekaran wilayah dengan sebagian wilayah Distrik Adireja, perpindahan ibu kota dari Majenang ke Cilacap dan perubahan nama dari Dayehluhur ke Cilacap, menjadi Onder Regentschap Cilacap atau dibawah Kabupaten Cilacap (sesuai ketetapan surat keputusan Wakil Gubernur Jendral, Mr. Merkus tanggal 27 Juni 1841 no 10231).

Berikut ini data luas wilayah dan jumlah penduduk di *Onder Regentschap* Cilacap pada tahun 1841:

Tabel 2.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk *Onder Regentschap* Cilacap pada tahun 1841

| Nama Distrik | Luas Pal | Jumlah Penduduk |
|---------------------|-----------------|------------------------|
| Cilacap | 434 | 700 |
| Adireja | 280 | 24.000 |
| Pegadingan | 496 | 8.316 |
| Majenang | 196 | 1.154 |
| Dayeuhluhur | 144 | 2.652 |

Akhirnya Kabupaten Cilacap terbentuk pada masa Residen Banyumas ke 9 yaitu Mr. van den Moore. Pengajuan usul Pemerintah Hindia Belanda tanggal 2 Oktober 1855 yang ditandatangani Gubernur Jendral Mr. Duymaer van Twist, pada Menteri Kolonial di Kerajaan Belanda, mendapat persetujuan Raja Belanda dalam *Kabinetsrescript* van 29 Desember 1855 Nomor 86, dan dengan Surat Rahasia Menteri Kolonial tanggal 5 Januari 1856 LaA No. 7/A disampaikan pada Gubernur Jendral.

Setelah menerima Surat Rahasia Menteri Kolonial, Pemerintah Hindia Belanda dengan surat keputusan Gubernur Jendral tanggal 21 Maret 1856 no 21 menetapkan *Onder Regentschap* Cilacap ditingkatkan statusnya menjadi Regentschap (Kabupaten) Cilacap. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda tanggal 6 Juli 1856 No. 17 memutuskan Raden Tumenggung Tjakrawedana II sebagai bupati Cilacap dengan gaji f 800 perbulan, Raden Sosrorejo menjadi Patih Cilacap dengan gaji f 100 perbulan.

Mulai tanggal 5 Januari 1856 inilah Majenang menjadi sebuah distrik di bawah Kabupaten Cilacap. Distrik Majenang pertama terdiri dari beberapa kecamatan/*onder distrik* yaitu Majenang, Karangpucung, Cimanggu, dan Wanareja. Sejarah panjang perjalanan Kecamatan Majenang ini menjadi dasar argumen peneliti bahwa wilayah Majenang sudah menjadi wilayah yang besar dan terkenal sebagai pusat pemerintahan, mulai dari masa klasik yaitu Astana Gunung Padang pada masa Kerajaan Dayeuhluhur, menjadi ibukota Kadipaten Dayeuhluhur, menjadi Kabupaten Majenang tersendiri, dan menjadi distrik pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan Catatan Perjalanan rombongan wisatawan Belanda tahun 1871 dia menulis di koran Java Bode terbitan 1874, penduduk Majenang pada waktu itu berjumlah sekitar 4.000 jiwa. Jumlah tersebut sebenarnya terhitung sedikit sekali karena akibat dari Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang melenyapkan hampir sepertiganya. Namun,

pasca perang tersebut yaitu tahun 1850 mulai datang para penduduk imigran yang didatangkan dari Yogyakarta dan Bagelen untuk mengelola pertanian sekitar 300 orang, sehingga populasi penduduk di Majenang kembali meningkat.

Pada perkembangan selanjutnya, di tahun 1895 dibangun jalan tanggul langsung lurus dari kota ke arah barat laut ke kampung Muvara tersebut untuk lebih dekat mengakses sungai Sungai Cikawung. Jalur perdagangan melalui Sungai Cikawung tersebut membuat berkembangnya Desa Bantar, Karang Jambu dan Cibeureum. Selain itu, dibangun juga Gudang-gudang untuk menyimpan hasil Kopi dan hasil Perkebunan lainnya di Selatan Kota Majenang persis di dekat Sungai Cilopadang, gudang tersebut dinamakan *Koffij Pakhuis* yang berada di sekitar hutan Gebang Kuning.

Berdasarkan pembahasan Panjang di atas, dapat disimpulkan bahwa Majenang membawa peranan penting dalam perkembangan Kabupaten Cilacap dari masa ke masa karena letaknya yang strategis yakni menjadi penghubung Priangan dengan Jawa serta sudah menjadi pusat pemerintahan sejak dahulu. Atas adanya dasar itu juga pada masa pemerintah kolonial Belanda, Majenang berkembang begitu pesat dalam segi Sosial dan Ekonomi.